

ARTIKEL

PERAN MODAL SOSIAL DAN MEKANISME SOSIAL BUDAYA (KELEMBAGAAN SOSIAL) MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN

M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah

Laboratorium Sosiologi-Penyuluhan Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran
Bandung, Jln Raya Bandung Sumedang Km 21 Tlp (022) 7798241, Fax (022) 7798212
Jatinangor Sumedang 45363

Pengantar

Dewasa ini upaya pengembangan peternakan khususnya pada sapi potong, persiapannya lebih mengutamakan kepada hal-hal yang bersifat teknis dan ekonomis, dibandingkan pada aspek sosial kelembagaan. Padahal fenomena pengembangan peternakan menunjukkan bahwa aspek teknis relatif dikuasai pengelolaannya dan aspek ekonomis sudah jelas bagaimana perhitungan pendapatannya. Namun berjalannya aspek teknis atau ekonomis, tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial yaitu modal sosial dan mekanisme sosial budaya kelembagaan peternakan, sebagai mekanisme kerja berjalannya suatu kegiatan usaha (Horton, 1964:206). Pemerintah belum mengoptimalkan fungsi dari kelembagaan dalam pengembangan peternakan. Padahal aspirasi dan cita cita peternak terakumulasi dalam kelembagaan (Landis, 1955:555) peternakan, berupa mekanisme kegiatan manajemen beternak yang disepakati, yang digerakan oleh spirit modal sosial. Modal sosial dan kelembagaan yang kuat dapat memperkuat posisi tawar peternak dalam menghadapi para tengkulak atau Bandar dipedesaan .

Padahal modal sosial dan mekanisme sosial budaya atau kelembagaan yang ada di pedesaan mempunyai peranan yang sangat penting, sebab gerak dan dinamika masyarakat pedesaan bertumpu pada aspek tersebut.

Berbagai keinginan dan aspirasi masyarakat pedesaan diwujudkan dalam mekanisme sosial budaya yang sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakatnya. Tetapi dilain pihak dalam kegiatan pembangunan khususnya di bidang pertanian/peternakan, program pemerintah yang di salurkan untuk masyarakat pedesaan pada tahap operasionalnya pada umumnya dilakukan dengan model mekanisme pembangunan yang merupakan hasil rekayasa aparat setempat. Yaitu dengan cara merekrut dan mengganti sumberdaya manusia yang berperan dalam mekanisme sosial budaya masyarakat lokal/setempat. Akibat demikian terjadi destruksi atau pengrusakan terhadap mekanisme sosial budaya yang telah berperan dan berfungsi bagi masyarakat setempat. Sebaliknya kelembagaan yang dibangun oleh pemerintah belum tersosialisasi dan tidak mencerminkan aspirasi dan keinginan masyarakat. Keberhasilan pembangunan khususnya di bidang peternakan tidak lepas dari masalah mekanisme sosial budaya yang ada di masyarakat pedesaan, sering dalam kenyataan program-program pembangunan peternakan yang tidak dilandasi oleh mekanisme sosial budaya yang ada di masyarakatnya tidak diterima dan

tidak berkembang. Hal ini sesuai dengan dasar filosofi pengembangan teknologi atau inovasi bahwa inovasi akan diterima oleh suatu masyarakat apabila teknologi atau inovasi tersebut mempunyai nilai basis sosial budaya yang relatif identik dengan nilai sosial budaya yang ada di masyarakat pedesaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan penelitian adalah mengetahui jenis, fungsi dan peran mekanisme sosial budaya atau kelembagaan spesifik yang ada pada masyarakat pedesaan yang berperan dalam pengembangan peternakan khususnya sapi potong. Kontribusi Penelitian dari segi pengembangan ilmu (teori) adalah untuk mengembangkan teori kelembagaan atau mekanisme sosial budaya yang responsif terhadap nilai-nilai modern.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah "Studi Kasus" dengan pendekatan kualitatif dan melakukan observasi lapangan dengan. Teknik penelitian bersifat eksploratif yaitu mengembangkan pandangan dari kasus fungsi dan peran mekanisme sosial budaya (kelembagaan) dalam pengembangan peternakan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu (peternak), dan kelembagaan termasuk kelompok peternak, sebagai informan ditentukan secara *purposive*. Data diperoleh wawancara mendalam (*indepth interview*), dilakukan uji validitas dengan cara *triangulasi* (dialogis antara teori, pakar dan data empiric). Data kualitatif dianalisis dengan cara pemahaman (*verstehen*) secara tekstual dan kontekstual, melalui proses

reduksi data tentang fungsi dan peran mekanisme sosial budaya (kelembagaan) yang ada di masyarakat pedesaan.

Hasil dan Pembahasan

Keadaan umum desa Karang Jaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Ciamis Jawa Barat : didirikan tahun 1982 sebagai pemekaran dari Desa Parigi, terdiri dari tiga dusun yaitu : Dusun Astamaya, Dusun Bojong Salawe dan Dusun Buni Ayu. Mata pencaharian masyarakat desa pada umumnya dibidang perikanan, pertanian, peternakan dan perdagangan.

Keadaan sosial budaya masyarakat Desa Karang Jaladri berbasis pada keadaan ekologi masyarakat petani dan nelayan, sehingga nilai sosial budaya yang berkembang mencerminkan tradisi kehidupan masyarakat petani dan nelayan. Nilai yang berkembang pada masyarakat bersumber dari nilai tradisi budaya Sunda dan Islam. Kelembagaan di desa mempunyai mekanisme social budaya yang berfungsi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti dilakukan pada usaha tani ternak juga usaha nelayan. Sesuai dengan pendapat bahwa institusi sosial merupakan bentuk formal budaya yang terdiri dari kumpulan kebutuhan kebutuhan sosial yang mendasar atau pokok (Landis, 1955 : 555).

Kelembagaan usata ternak mempunyai beberapa bagaian-bagian sesuai dengan tugasnya, dibidang kesejahteraan anggota, bidang usaha dan manajemen kegiatan. Karena kelembagaan sebagai wahana saluran aspirasi, kehendak dan sekaligus instrumen untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia maka institusi memiliki berbagai komposisi dan fungsi. Dijelaskan oleh Chitambar (1972) bahwa komposisi dan fungsi kelembagaan meliputi material tujuan budaya, prasarana partisipasi efektif bagi

anggota, pedoman bertindak dan berfikir, berfungsi merealisasikan kebutuhan dasar, mempunyai struktur seperangkat norma dari harapan dan jaringan untuk pesan, mempunyai fungsi manifes dan laten, mempunyai peran besar dalam pengawasan individual dan sosial, mempunyai banyak fungsi (amalgamasi), mempunyai beberapa unsur sebagai komposisi lembaga, mempunyai efek fungsi positif dan negatif, sebagai sarana untuk mengefektifkan kegiatan. Berdasarkan pengertian tersebut maka kelembagaan sosial merupakan mekanisme sosial budaya kompleks yang memiliki peran dan fungsi strategis untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan (Munandar, 2002).

Karena sifat kompleksitas dan strategisnya kelembagaan atau mekanisme sosial budaya (pada masyarakat pedesaan) maka akan menentukan dinamika dan gerak masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Bahkan Esman (1971) menyatakan bahwa kelembagaan adalah suatu standar untuk menilai keberhasilan dari usaha-usaha pembangunan lembaga. Konsep kelembagaan menunjukkan bahwa hubungan-hubungan tertentu dan pola-pola tindakan yang dicakup dalam organisasi adalah bersifat normatif, baik di dalam organisasinya sendiri maupun untuk satuan sosial lainnya. Konteks pembangunan mekanisme sosial budaya (kelembagaan) mempunyai variabel kepemimpinan, doktrin, program, sumberdaya dan struktur internal. Variabel tersebut penting untuk tujuan analisis pengembangan model mekanisme sosial budaya. Sebagai upaya modernisasi dan pemanfaatan mekanisme sosial budaya (institusi) maka perlu disadari akan adanya keterbelakangan "organisasi" kelembagaan serta perlunya reaktualisasi potensi mekanisme sosial budaya yang akan dijadikan proyek pembangunan dan pengembangan organisasi (Cernea, 1989) . Namun di pihak lain ada

pula pandangan bahwa mekanisme sosial budaya atau kelembagaan masyarakat tradisi perlu disikapi secara arif dan responsif karena kelembagaan atau mekanisme sosial budaya tersebut sesuai dengan nilai-nilai modern, hanya para pengambil kebijakannya yang belum memahami tingkat kearifan mekanisme sosial budaya masyarakat tersebut. Demikian halnya untuk pengembangan peternakan perlu kearifan dalam memandang kelembagaan atau mekanisme sosial budaya yang ada di masyarakat pedesaan, karena diasumsikan bahwa kelembagaan tersebut responsif terhadap nilai-nilai modern (Munandar, 2002).

Peran dan Fungsi Kelembagaan Yang ada di Desa

Kelembagaan yang ada di desa terdiri dari kelembagaan yang sifatnya formal dan informal. Kelembagaan formal adalah kelembagaan yang sengaja difasilitasi oleh pemerintah dan dibina oleh pemerintah seperti : PKK, Koperasi, LKMD dan LMD. Kelembagaan formal tersebut di daerah penelitian kurang berkembang kecuali kelembagaan yang langsung berhubungan dengan pemerintah desa seperti LKMD dan LMD masih berperan dalam menjalankan fungsinya dimasyarakat. Kelembagaan PKK yang biasanya berkembang, di daerah penelitian fungsinya digantikan oleh kelembagaan informal yang sifatnya tolong menolong dan kebersamaan atau "sambatan" dalam berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Mekanisme Sosial Budaya Masyarakat Desa

Kelembagaan tradisi yang ada di daerah penelitian memiliki mekanisme sosial budaya yang berperan dalam pemenuhan kebutuhan pola aktifitas kehidupan sehari-

hari masyarakat. Semua aktifitas yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat diwujudkan dalam berbagai kelembagaan tradisi, baik yang berhubungan dengan kebutuhan antar warga atau antar sesama maupun yang berhubungan dengan "Yang Maha Kuasa" seperti nampak pada uraian berikut di bawah ini.

a. Kelembagaan "Sambatan". Kelembagaan "sambatan" merupakan basis nilai sosial budaya bagi kegiatan lembaga lainnya. "Sambatan" yang merupakan kerjasama tanpa pamrih yang dikondisikan oleh ekologis usahatani, yang memaksa individu petani untuk bekerjasama karena tidak dapat digarap secara individual, termasuk dalam kegiatan usaha ternak potong, dimana pola hubungan social kerjasama dalam sambatan dipraktekan dalam usahaternak, sehingga kelompok peternak semakin solid.

b. Ritual bersyukur dalam usaha ternak sapi potong, terdiri dari: "Babarit", "Sedekah Laut", "Hajat Bumi, Kelembagaan sosial budaya tersebut merupakan mekanisme sosial budaya yang memelihara pola spirit usaha ternak.

Kelembagaan Ekonomi Desa dan Perkembangan Koperasi.

Lembaga ekonomi desa yang ada di daerah penelitian direpresentasikan oleh dua kelompok kegiatan ekonomi, yaitu Lembaga Kesejahteraan Kampung (LKK) dan Kelompok Usaha Bersama (KUB). Kedua kelompok kegiatan ekonomi tersebut berkiprah dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraannya.

a. Lembaga Kesejahteraan Kampung (LKK)

Lembaga ini berupa lembaga ekonomi hasil swadaya masyarakat yang diselenggarakan di tingkat RT berjumlah kurang lebih 40 keluarga, dengan kepengurusan terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, Bendahara, Sekertaris dan Anggota

adalah Kepala Keluarga (Suami)., selain itu ada pengawas terdiri dari anggota (2 orang) yang ditunjuk oleh anggota atas kesepakatan bersama dan biasanya yang ditokohkan atau sesepuh. Mekanisme kegiatannya berupa simpan pinjam sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan yang diambil oleh warga kampung terutama banyak dilakukan oleh perempuan. Kegiatan ini cukup efektif dan efisien serta fungsional dalam menunjang kesejahteraan warga masyarakat. LKK dapat dikatakan sebagai embrio untuk menjadi koperasi, tetapi warga tampaknya tidak menginginkan LKK ini mengarah menjadi koperasi, karena dengan LKK mekanisme kegiatan ekonomi dapat menunjang kehidupan ekonomi keluarga. LKK yang sudah berjalan ada di tiap dusun. LKK yang sudah berkembang dalam kegiatan simpan pinjam merupakan kelembagaan ekonomi yang secara tidak langsung menjadi dorongan nilai dari kelembagaan sosial budaya. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa kelembagaan sosial budaya yang memiliki prinsip kebersamaan, kesepahaman dan kesepakatan nilainya tertanam juga dalam kegiatan LKK, sehingga kegiatan tersebut tidak mengalami banyak perbedaan dalam sikap dan tujuan . Artinya ada upaya untuk saling menghargai dan toleran apabila ada perbedaan. Kinerja LKK tampak sebagai berikut :

Tabel 1. Kinerja Lembaga Kesejahteraan Kampung

No	Kriteria	Kegiatan Praktis/Kondisi yang ada
1	Nilai dominan	-Kebersamaan, kesepahaman
2	Struktur	-Organisasi informal, berjumlah 40 keluarga
3	Relasi Sosial	-Saling menghargai dan toleransi
4	Fungsi	-Pemenuhan kebutuhan ekonomi
5	Lingkup kegiatan	-Ekonomi Keluarga : simpan pinjam

b. Kelompok Usaha Bersama (KUB)

Lembaga ekonomi di bidang peternakan dapat di representasikan oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang merupakan kegiatan usaha kelompok peternak sapi potong yang didasarkan atas dasar saling percaya.

Jumlah anggota KUB sebanyak 34 orang (4 orang perempuan) dengan jumlah ternak 102 ekor sapi potong. Keorganisasian KUB diberi nama KUB Lumba-lumba. Struktur organisasinya terdiri dari : Ketua, Sekertaris, Bendahara dan Seksi Kesehatan, Seksi Lapangan, Seksi Ekonomi /Seksi Pemasaran dan Seksi, Limbah. Struktur fungsional organisasi yang menjalankan aktifitas sehari-hari dikendalikan oleh Ketua, Sekertaris, Bendahara dan seksi Lapangan. Sedangkan seksi lainnya masih belum dapat menjalankan fungsinya secara maksimal, misalnya seksi limbah sampai saat ini belum berfungsi karena limbahnya masih dimanfaatkan untuk kepentingan pupuk kebun rumput bersama. Kegiatannya meliputi simpan-Pinjam kegiatan Penyediaan Pakan, Perkandangan,Keamanan Ternak,Pembibitan Ternak, Pemasaran.

Untuk pengembangan koperasi, yang harus diberdayakan adalah sumberdaya manusianya baik ditingkat pengurus maupun anggota sebagai "user " dan sekaligus juga sebagai "owner", baik LKK maupun KUB masing –masing sudah menerapkan prinsip koperasi, hanya mungkin pelembagaan koperasi oleh petugas penyuluh dari dinas koperasi. Pemahaman koperasi melalui instansi tersebut sangat diperlukan agar kedua organisasi tersebut menjadi besar dan maju dalam wadah perkoperasian sebagai organisasi lembaga swadaya masyarakat (self help organization) sesuai dengan Undang-undang Perkoperasian No.25 Tahun 1992 . Dengan berbekal badan usaha koperasi maka akan memudahkan hubungan dengan pihak ketiga atau pihak luar koperasi misalnya lembaga per bank-an sebagai penyedia dana dan lembaga lainnya

yang akan mensuplai sarana produksi. Kinerja KUB tersebut secara rinci tampak berikut:

Tabel 2. Kinerja Kelompok Usaha Bersama

No	Kriteria	Kegiatan praktis/Kondisi yang ada
1	Nilai dominan	-Kepercayaan
2	Struktur	-Organisasi formal badan usaha koperasi dengan anggota 34 orang
3	Relasi social	
4	Fungsi	-Meningkatkan pendapatan peternak
5	Lingkup Kegiatan	-Ekonomi Keluarga : Simpan-Pinjam, Penyediaan Pakan, Perkandangan, Keamanan Ternak, Pembibitan Ternak dan Pemasaran.

Relasi Lembaga Tradisi Dengan LKK dan KUB

Nilai rujukan atau inspirasi dari kelembagaan LKK dan KUB adalah berbasis pada lembaga tradisi seperti "sambatan", "babarit", sedekah laut dan hajat bumi. Lembaga tradisi tersebut sudah lama mengakar dan merupakan ritual fungsional, bagian dari pemeliharaan pola komunitas setempat. Ritual tersebut selalu dijadikan fondasi untuk integrasi keluarga, agama dan menjadi ruang pendidikan bagi komunitas. Pada ritual tersebut ada unsur praktis agama, praktek ikatan keluarga dengan saling membagi makanan dan pendidikan harmoni dengan lingkungan, sekaligus pelestarian lingkungan. Pada saat masyarakat akan mengkristal menjadi system social yang fungsional, maka sekaligus menjadi jelas dan mengkristal tujuan masyarakatnya yaitu mencapai sejahtera. Kemudian pola adaptasi lembaga tradisi tersebut dengan upaya mencapai tujuan tersebut di bulatkan menjadi LKK dan KUB. Kemudian mereka berintegrasi dalam satu tujuan yang sama melalui lembaga semi modern LKK dan KUB. Hal demikian menunjukkan komunitas dengan LKK dan KUB telah mencapai derajat sebagai system social, yang telah memenuhi persyaratannya yaitu adaptasi, pencapaian

tujuan, daya integrasi dan adanya pemeliharaan pola pencapaian kesejahteraan, sesuai dengan pandangan Parsons (1968).

Kesimpulan dan saran

1. Kelembagaan yang ada di masyarakat desa adalah sebagai berikut : (a). Jenis kelembagaan yang telah berperan dalam mekanisme sosial budaya adalah sambatan, babarit, sedekah laut dan hajat bumi. Kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi adalah Lembaga Kesejahteraan Kampung (LKK), Kelompok Usaha Bersama dan Simpan-Pinjam. (b) Fungsi dan peran mekanisme sosial budaya dari kelembagaan tersebut adalah: berfungsi sebagai menyalurkan aspirasi dan tujuan kegiatan usahanya, serta berperan dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota kelebagaannya, sedangkan kelembagaan sosial lebih berperan dalam meningkatkan integrasi masyarakat dan memelihara pola-pola hubungan sosial yang harmoni dalam masyarakat.

2. Kelembagaan spesifik yang berperan memberi spirit dalam mekanisme sosial budaya pengembangan peternakan dalam LKK dan KUB adalah sambatan, babarit, hajat bumi dan sedekah laut telah berfungsi menyalurkan aspirasi dan tujuan beternak serta menunjang peningkatan pendapatan.

3. Kelembagaan tradisional lokal merupakan basis bagi LKK dan KUB yang merupakan wahana pengembangan atau pembangunan peternakan.

Saran: Pihak pemerintah desa (khususnya) perlu memberikan dorongan dan memfasilitasi terselenggaranya kegiatan pengembangan peternakan melalui basis kelembagaan setempat, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Citambar, 1972. *Introductory Rural Sociology*. Weley Eastern Privet Limited New Delhi
- Carnea, 1989 Dalam *Sosiologi Modernisasi*, Editor Attir dkk., terjemahan Hadikusumo. PT. Tiara Wacana ,Yogyakarta.
- Esman, 1971. Dalam Easton, *Pembangunan Lembaga Dan Pembangunan Nasional*. Terjem Gurino. Penerbit UI Press Jakarta
- Horton, 1964. *Sociology*, The Grow Hill. New York
- Landis, 1958. *Introductory Sociology* , Ronal Press. New York
- Munandar Sulaeman, 2002. *Dinamika Masyarakat Transisi*. Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Munandar M, 2008. *Restrukturasi Kelembagaan Persusuan Menuju Partisipatif dan Kesetaraan posisi Tawar Peternak*, dalam Prociding FGD Arah Pengembangan Industri Persusuan Jangka Panjang, Fapet Unpad.
- Parsons, Tacott, 1968. *The Social System*, Routledge & Kegan Paul, London
- Pemda Ciamis,2008; *Buku Statistik*, Pemda Kab. Ciamis